INDO POS

Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sept | Okt | Nov | Des

2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Pencairan Anggaran DKI 2015 Molor

Ratusan Gedung Tunggak Bayar Listrik

KETERLAMBATAN pengesahan APBD 2015 berdampak keterlambagan pembayaran biaya operasional aparatur di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Sebanyak 158 gedung kantor milik Pemprov DKI hingga kini menunggak pembayaran biaya listrik, sejak Januari-Maret 2015.

Gedung-gedung milik DKI dimaksud antara lain kantor kelurahan, kecamatan, dan dinas, puskesmas, serta gedung sekolah. Total tunggakan tersebut mencapai Rp 134 milyar. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budihartono mengatakan, telah mendapat laporan dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

"Saya minta kepala Dinas Pendidikan segera mengecek sekolah untuk segera mengajukan proposal anggaran pembayaran telepon, air, listrik dan internet (Tali)," ujar dia, kemarin (8/4).

Menurut dia, kepala sekolah bisa mengajukan surat permohonan untuk kebutuhan pembayaran Tali. Setelah ditampung oleh Dinas Pendidikan, maka bisa langsung disampaikan ke BPKAD DKI.

"Sudah ada SK gubernur mengenai anggaran pendahuluan. Makanya saya bingung kalau ada sekolah yang nggak bisa bayar listrik. Ini karena ketidaktahuan atau kemalasan bendaharanya untuk mengajukan surat ke kami," tandas Heru.

Adanya SK gubernur tentang anggaran pendahuluan, BPKAD setiap bulan mengeluarkan anggaran untuk pembayaran operasional SKPD di DKI Jakarta. Di antaranya untuk operasional Dinas Kebersihan yang meliputi kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM), dan petugas harian lepas (PHL).

Termasuk juga untuk memenuhi kebutuhan operasional di Dinas Tata Air sebesar Rp 1,7 milyar, dan Dinas Bina Marga sebesar Rp 200 milyar. "Sekarang saja, Dinas Kebersihan juga sudah mengajukan anggaran operasional untuk PHL, BBM dan Tali di bulan Maret. Jadi ajukan dulu, baru nanti saya keluarkan anggarannya. Saya nggak bisa bayar langsung ke PLN. Setelah ada proposal pengajuan, baru saya bayarkan ke sekolah atau kantor yang bersangkutan untuk bayarkan ke PLN," tukas Heru. **(pes)**